

## Pengendalian Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Oleh :

H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum,  
Hairul Ikhwan, S.Hut. Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

### PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan yang efektif untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu negara adalah melalui kebijakan fiskal. Stabilitas ekonomi suatu negara diantaranya tercermin dari stabilitas harga, dalam arti tidak terdapatnya gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi-sendi perekonomian.

Inflasi dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks) seperti halnya kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dilihat dari segi bobot dalam keranjang.

IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena beberapa alasan. Inflasi bisa memperburuk distribusi pendapatan yaitu menjadi tidak seimbang, menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama sebelum pandemic covid-19 terus mengalami peningkatan, namun sempat mengalami kontraksi ketika di tahun 2020 karena pandemi covid-19 di angka minus 1,19 dan dengan inflasi di angka 5,32 di tahun 2020

Secara potensi terdapat 5 sektor lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, yaitu: Pertanian kehutanan perikanan (24,57%), Pertambangan dan Penggalian (10,22%), Perdagangan (9,51%), Konstruksi (8,00%) dan Industri Pengolahan (7,93%).

### RINGKASAN

Tingkat harga merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam system perekonomian modern, karena bisa menjaga keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu negara. Dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi dapat mengaburkan bahkan menghilangkan indikator tersebut dan mendistorsi harga-harga yang terjadi. Hal ini akan menyulitkan suatu perencanaan dan tidak memotivasi masyarakat dan juga dunia usaha untuk melakukan tabungan dan investasi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada hakikatnya merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara angka inflasi mengikuti inflasi Kota Banjarmasin, yang secara kondisi dari tahun 2014 – 2020 hampir sama dengan kondisi inflasi Kalimantan Selatan. Dimana sejak tahun 2015 mengalami penurunan, walaupun ada kenaikan sedikit di Tahun 2017 dan Tahun 2019, dan Tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi penurunan di angka 1,67 dan bahkan terjadi deflasi.

Deflasi terjadi Ketika penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan berdampak negatif, terutama dalam hal ini produsen barang atau penyedia jasa, bahkan sampai pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

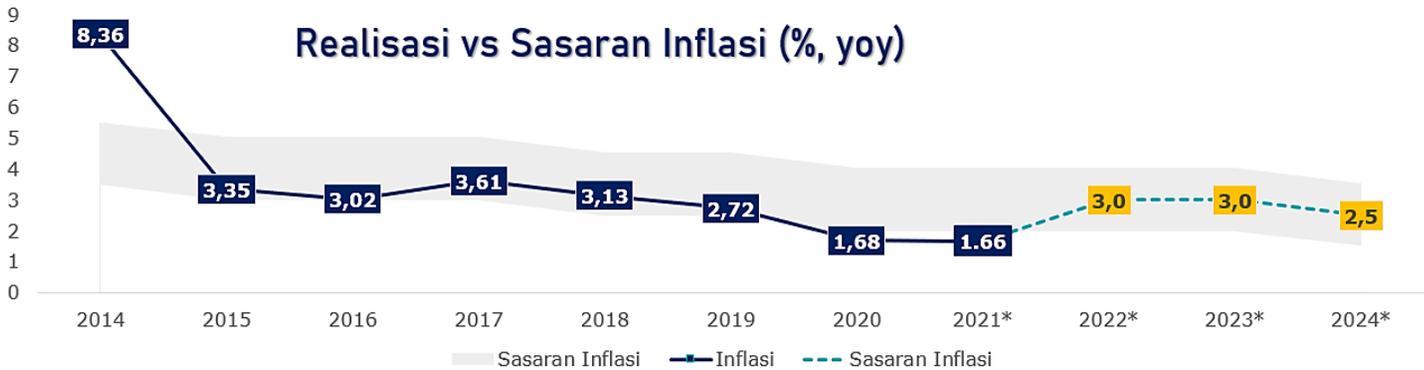
Tantangan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah di *Volatile Food*, yaitu komponen inflasi yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi. Lebih khusus di Hulu Sungai Selatan pada komoditas ; cabe, bawang merah, minyak goreng, ikan haruan, ikan papuyu dan gula pasir.

Kebijakan / Strategi 4 K menjadi pilihan utama dalam pengendalian inflasi, yaitu : Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif

## TINJAUAN KEBIJAKAN

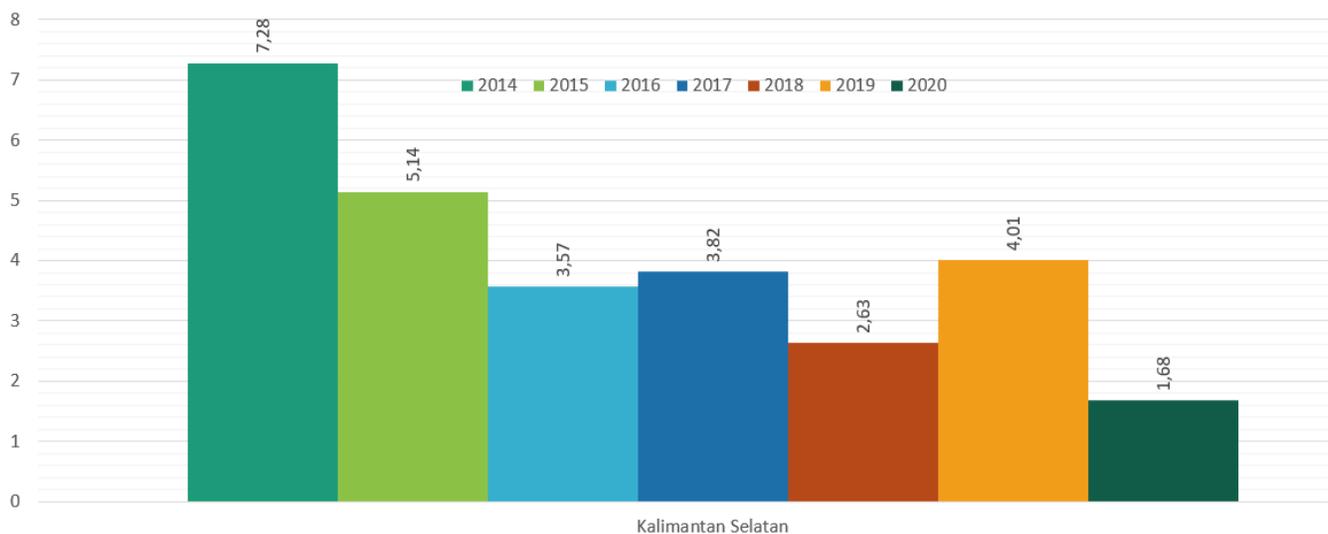
Secara Nasional sasaran inflasi 2022-2024 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/ 2021, sasaran inflasi ditetapkan sebesar  $3\pm 1\%$  (yoy) untuk tahun 2022 dan 2023, dan sebesar  $2,5\pm 1\%$  (yoy) pada tahun 2024.

Sejak tahun 2015, laju inflasi di Indonesia terus mengalami tren penurunan dan berada dalam kisaran sasarannya, kecuali pada masa pandemi COVID-19 (Tahun 2020 dan 2021) dimana inflasi nasional tercatat 1,68 dan mulai keluar dari kisaran sasaran. Ke depan, pencapaian inflasi diupayakan untuk kembali masuk ke sasaran target untuk menjaga kredibilitas dan ekspektasi inflasi.



Ket: Inflasi tahun 2021 merupakan realisasi inflasi bulan Oktober 2021

Adapun inflasi di Kalimantan Selatan sejak tahun 2015 juga relative mengalami penurunan, walaupun ada kenaikan sedikit di Tahun 2017 dan Tahun 2019. Adapun di Tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda dan terjadi kelesuan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat, sehingga terjadi penurunan di angka 1,68 atau bahkan masuk deflasi.



Pada September 2021, Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,05% mtm, bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat deflasi telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Peningkatan produksi cabai rawit dan bawang merah di sentra produksi di Jawa turut meningkatkan pasokan di Kalsel.

Kelompok transportasi juga menjadi pendorong deflasi terutama akibat permintaan angkutan udara yang masih lemah seiring dengan perpanjangan PPKM level 4. Di sisi lain, kelompok perumahan, air, listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) menjadi penahan deflasi lebih dalam akibat kenaikan harga BBRT LPG 3kg di tengah keterbatasan pasokan untuk masyarakat non penerima Kartu Kendali LPG 3kg.

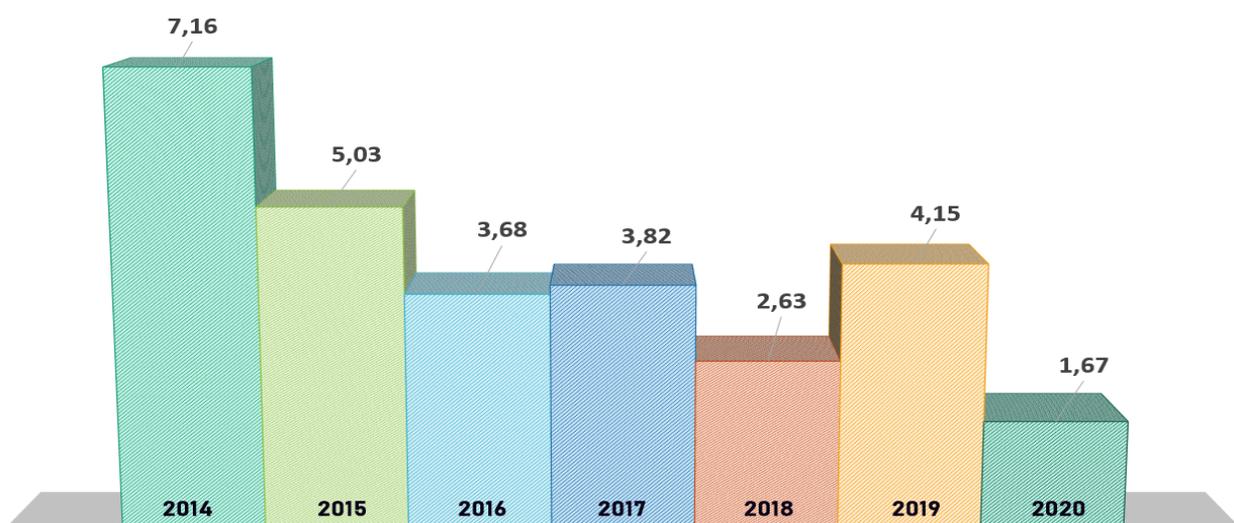
INFLASI KALIMANTAN SELATAN			
	%mtm	%ytd	%yoy
Ags	-0,09	0,89	2,30
Sep	-0,05	0,84	2,56

INFLASI DI KOTA IHK (%mtm)			
	Banjarmasin	Tanjung	Kotabaru
Ags	-0,14	0,01	0,32
Sep	-0,04	-0,04	-0,18

Deflasi terjadi Ketika penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sekilas deflasi tampak menguntungkan bagi orang karena harga-harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau bagi konsumen. Namun deflasi bisa jadi pisau bermata dua, yang berarti bisa merugikan atau berdampak negatif, terutama dalam hal ini produsen barang atau penyedia jasa. Deflasi yang terjadi secara tajam atau terus menerus bisa merugikan aktivitas jual beli. Penurunan harga barang dan jasa seringkali membuat produsen atau penyedia jasa mengalami kerugian karena penjualan tak mampu menutup biaya produksi maupun biaya operasional. Jika deflasi semakin parah, tak jarang produsen atau penyedia jasa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban. Semakin tinggi deflasi, semakin tinggi pula potensi PHK tenaga kerja. Itu sebabnya, deflasi adalah seringkali dikaitkan dengan kondisi resesi. Deflasi seringkali terjadi saat kondisi perekonomian melesu. Roda perekonomian yang melambat terjadi karena permintaan atas konsumsi dan investasi yang anjlok.

Adapun untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana bukan sebagai Kota Inflasi maka secara angka inflasi mengikuti inflasi Kota Banjarmasin, yang secara kondisi dari tahun 2014 – 2020 hampir sama dengan kondisi inflasi Kalimantan Selatan. Dimana sejak tahun 2015 mengalami penurunan, walaupun ada kenaikan sedikit di Tahun 2017 dan Tahun 2019, dan Tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi penurunan di angka 1,67.



Tantangan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah di *Volatile Food*, yaitu komponen inflasi yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi. Lebih khusus di Hulu Sungai Selatan pada komoditas ; cabe, bawang merah, minyak goreng, ikan haruan, ikan papuyu dan gula pasir.

Identifikasi permasalahan dengan beberapa komoditas ini dijabarkan sebagai berikut :

a) Cabe

- Faktor musiman berupa melonjaknya harga pada periode atau hari raya tertentu
- Ketergantungan pasokan yang disebabkan jumlah pasokan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.
- Hambatan cuaca terhadap produksi maupun distribusi.
- Keterbatasan luas lahan dan rendahnya produktivitas lahan.
- Sifat komoditas yang tidak tahan lama

b) Bawang merah

- Faktor musiman berupa melonjaknya harga pada periode atau hari raya tertentu
- Produksi terbatas akibat: (i) lahan yang terbatas, (ii) kurang minatnya petani dan keahlian yang terbatas, (iii) sangat tergantung pada cuaca/iklim.
- Pasokan tergantung pada kondisi cuaca/gelombang laut/sungai
- Struktur pasar Oligopoli, Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang
- Belum terdapat pengembangan produksi yang bersifat massif
- Rantai perdagangan cukup panjang karena sebagian besar pasokan berasal dari luar
- Belum tersedianya lembaga yang berkompeten menampung hasil panen
- Belum ada manajemen stok dan cold storage

c) Minyak goreng

- Faktor musiman berupa melonjaknya harga pada periode atau hari raya tertentu
- Ketergantungan pasokan yang disebabkan jumlah pasokan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.
- Hambatan cuaca terhadap produksi maupun distribusi

- d) Ikan haruan dan ikan papuyu
- Tingginya perminta di waktu-waktu tertentu
  - Faktor musiman berupa melonjaknya harga pada periode atau hari raya tertentu
  - Hambatan cuaca terhadap produksi maupun distribusi.
  - Pasokan tergantung pada kondisi cuaca/sungai
  - Belum masifnya budidaya haruan dan papuyu
- e) Gula pasir
- Hambatan cuaca terhadap produksi maupun distribusi.
  - Rantai perdagangan cukup panjang karena pasokan berasal dari luar
  - Faktor musiman berupa melonjaknya harga pada periode atau hari raya tertentu
  - Struktur pasar Oligopoli, Penetapan harga dan pengaturan stok didominasi pedagang

Dari tantangan ini banyak pula yang dipengaruhi oleh aspek Nasional dan Regional sehingga perlu mengintegrasikan Roadmap Pengendalian Inflasi Kabupaten dengan di Provinsi dan Nasional. Serta sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana Roadmap Pengendalian Inflasi dijadikan sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional & daerah, menjadi dasar penyusunan program kerja TPID secara periodical. Evaluasi roadmap dan program kerja ke depan akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi, serta memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah.

Berikut tawaran kebijakan / program kerja pada Roadmap Pengendalian Inflasi Kabupaten :

4K	Program Strategis	Program Kerja
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1. Pemantauan Harga Sembako dan Kebutuhan Lainnya dan dipublish ke masyarakat
		2. Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok, melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Bahan Pokok</li> <li>▪ Operasi Pasar</li> </ul>
3. Media Informasi / Transaksi Digital		
	Mengelola Permintaan	4. Menjaga jadwal /pengaturan masa tanam dan panen di bidang pertanian
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1. Penggunaan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Kayapu</li> <li>▪ Pemamfaatan Cabe Apung</li> <li>▪ Pemamfaatan Bioflok</li> </ul>
		2. Pengembangan lumbung pangan ( <i>food estate</i> ) melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produksi pangan/horti</li> <li>▪ Peningkatan lumbung pangan daerah/kecamatan/desa</li> </ul>
		3. Pengembangan kampung hortikultura dan perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kampung Bawang merah</li> <li>▪ Kampung Aneka cabai</li> <li>▪ Kampung Haruan</li> </ul>

4K	Program Strategis	Program Kerja
<b>Ketersediaan Pasokan</b>	<b>Produksi Domestik</b>	4. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan jaringan irigasi</li> <li>▪ Rehabilitasi jaringan irigasi</li> </ul>
		5. Peningkatan produksi peternakan
		6. Peningkatan ketersediaan telur ayam ras tahunan
		7. Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura</li> <li>▪ Pengolahan pascapanen melalui UMKM</li> </ul>
	<b>Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah</b>	8. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beras (CBP)</li> </ul>
	<b>Mekanisme Ekspor Impor</b>	9. Diversifikasi daerah asal pemasok komoditas pangan strategis melalui kerjasama MoU 10. Misi Dagang ke Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota
<b>Penguatan Kelembagaan</b>	11. Penguatan kelembagaan petani pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, pedagang pasar dan UMKM. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelembagaan di Pertanian, Perkebunan, Peternakan</li> <li>▪ Kelembagaan di Perikanan</li> <li>▪ Kelembagaan di Pedagang Pasar</li> <li>▪ Kelembagaan di UMKM</li> </ul>	

4K	Program Strategis	Program Kerja
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	1. Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam mendukung kelancaran dsitribusi
		2. Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI):
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan fasilitas perdagangan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jalan dengan kualitas baik</li> <li>▪ Revitalisasi Pasar</li> <li>▪ Pembinaan Pengelola Pasar</li> </ul>
		4. Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan dan kuliner sisi hilir melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi UMKM pangan dan kuliner binaan dgn e-commerce di level nasional maupun daerah</li> </ul>
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	1. Penyediaan sistem informasi harga dan monitoring stok pangan strategis 2. Peningkatan kualitas dan keakuratan data dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerjasama dengan BPS dan Bank Indonesia</li> <li>▪ Pemamfaatan data PIHPS <a href="https://hargapangan.id/">https://hargapangan.id/</a></li> </ul>
	Koordinasi Tim	3. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi nasional 4. Peningkatan Kualitas TPID Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat Koordinasi TPID Kabupaten</li> <li>▪ Peningkatan SDM dan Wawasan Tim (TPID Kabupaten)</li> <li>▪ Membangun Kolaborasi</li> </ul>
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	5. Pelaksanaan bauran kebijakan yg kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yg rutin dan terpercaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan TPID</li> <li>▪ Iklan Layanan Masyarakat</li> <li>▪ Media Informasi</li> </ul>